



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

**Press Release**

**Edisi : 14 Juli 2010**

**Persidangan atas kasus penyerangan 28 April 2006 tidak mendapatkan terjemahan yang memadai**

Pada tanggal 13 Juli 2010 Pengadilan Distrik Dili membacakan tuntutan terhadap kasus dengan nomor perkara No.88/C.ord/TDD/2009 sehubungan dengan kasus penyerangan pada 28 April 2006 di gedung pemerintahan (*palasiu governu*) yang melibatkan terdakwa O M L. Persidangan berlangsung dengan komposisi hakim majelis atau hakim kolektif yang dipimpin oleh hakim ketua Jacinta da Costa Correia S.H bersama dua hakim anggota Guilhermino da Silva S.H dan Maria Leonor Botelho Hakim Internasional. Di lain pihak, kejaksaan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum José Luis Landim dan pihak pengacara diwakili oleh kantor pengacara umum, yakni oleh Marcelo Mendonça Pengacara Internasional.

JSMP mencatat bahwa dalam persidangan ini bahwa tidak adanya proses terjemahan yang efisien atas pembacaan tuntutan yang disampaikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak Pengacara Umum. Mengingat situasi tersebut, hakim ketua sidang harus mengambil alih untuk menyimpulkan apa yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Umum.

Luis de Oliveira Sampaio, selaku direktur JSMP menilai bahwa persoalan bahasa selama ini masih menjadi salah satu masalah serius dalam sistem peradilan di Timor Leste. Situasi ini seringkali menimbulkan kesulitan dan kebingungan bagi para penterjemah dan juga bagi para terdakwa maupun korban, seperti yang terjadi dalam pembacaan tuntutan terhadap kasus 28 April 2006. mengenai pengerusakan di gedung pemerintahan atau *palasiu do governu*. Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan dan mendesak pemerintah Timor Leste untuk mencipta kondisi untuk menyediakan para penterjemah yang memiliki kualifikasi penguasaan bahasa Portugis, dan pemahaman memadai mengenai istilah teknis hukum agar membantu proses persidangan berjalan secara efektif. JSMP tetap merasa prihatin karena dalam persidangan ini, JSMP mencatat bahwa terjemahan dari bahasa Portugis ke bahasa Tetum mengalami kesulitan cukup banyak dan terjadi secara berulang dan juga membingungkan, sehingga ketua pimpinan sidang harus mengambil alih untuk meluruskan atau

menjelaskan apa yang tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh para terdakwa.

Dalam pembacaan tuntutannya, jaksa penuntut umum, menuntut para terdakwa dengan pasal 189 (3) mengenai kejahatan penghasutan dan pasal 193 (1) KUHP mengenai ketidakpatuhan terhadap perintah yang sah. Namun demikian, pengacara para terdakwa/tertuduh dalam pembelaannya, menyebutkan bahwa apa yang dilakukan atau disampaikan oleh kliennya dalam orasinya di depan publik pada tanggal 24 hingga 28 April 2006, tidak termasuk dalam kategori kejahatan sebagaimana dituduhkan dalam tuntutan JPU, karena kliennya tidak menunjukkan perilaku atau tindakan yang mengarah kepada perilaku penghasutan untuk melakukan kejahatan. Namun kliennya hanya menyampaikan opini atau pendapatnya dan mendesak penyelesaian atau solusi atas persoalan dugaan diskriminasi di tubuh institusi F-FDTL yang memunculkan kelompok petisi pada waktu itu. Namun, jika aksi itu kemudian berubah menjadi kekerasan dan kejahatan terhadap asset Negara, hanya merupakan reaksi publik yang merasa tidak puas dengan pemerintah yang sengaja mengabaikan permohonan dan tuntutan mereka selama lima hari berturut-turut.

Untuk informasi selanjutnya hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883